BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan divisi keuangan pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat dan jumlah responden yang bisa dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden. Identitas responden tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-Laki	32	53,3%
2	Perempuan	28	46,7%
Total		60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner

Responden yang terpilih dalam penelitian ini sebagian besar didominasi oleh laki-laki sebanyak 53,3%, sedangkan perempuan sebanyak 46,7%. Tetapi pada dasarnya semua karyawan dapat mengoperasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), karena Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tersebut tidak digolongkan berdasarkan *gender*.

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia (Tahun)	Frekuensi	Presentase
1	26 - 30	4	6,7%
2	31 - 35	7	11,7%
3	36 - 40	20	33,3%
4	41 - 45	11	18,3%
5	46 - 50	12	20%
6	51 - 55	5	8,3%
7	56 - 60	1	1,7%
Total		60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasarkan kategori usia, responden berusia 36 – 40 tahun mendominasi hingga 33,3% dari jumlah sampel karyawan yang menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Hal ini disebabkan karena sebagian besar karyawan masih termasuk dalam usia produktif untuk bekerja. Diikuti oleh responden yang berusia 46 – 50 tahun sebesar 20%, kemudian responden yang berusia 41 – 45 tahun sebesar 18,3% dan hanya sebesar 1,7% responden yang berusia hingga 60 tahun.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	SMP	0	0%
2	SMA/SMK/STM	19	31,7%
3	D3	15	25%
4	S1	24	40%
5	S2	2	3,3%
6	S3	0	0%
Total		60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden karyawan (*user*) dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berpendidikan terakhir adalah S1 hingga 40%, kemudian SMA/SMK/STM sebesar 31,7% dan D3 sebanyak 25% responden. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi tingkat pendidikan terakhir pada karyawan divisi keuangan Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat, yaitu mayoritas tingkat S1.

4.2 Analisis Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan Di Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat

Adapun proses-proses pelaksanaan dan penatausahaan yang sedang berjalan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), yaitu :

1. SPP (Surat Permohonan Pengajuan)
2. SPM (Surat Perintah Membayar)
3. Pertanggungjawaban UP/GU/TU (SPJ)
4. Pelimpahan Uang (SP2D)
5. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berjalan di Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat dapat di deskripsikan secara detail dalam penelitian ini, yaitu:

4.2.1 Tampilan Utama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Berikut adalah tampilan utama dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).



Gambar 4.1

Tampilan Utama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

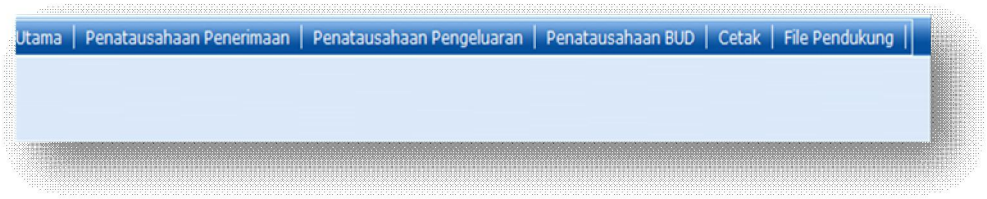
Selanjutnya akan tampil kotak login sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :



Gambar 4.2

Tampilan Login Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Setelah pengisian dilakukan, selanjutnya akan tampil menu utama dalam modul sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :



Gambar 4.3

Tampilan Menu Utama

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

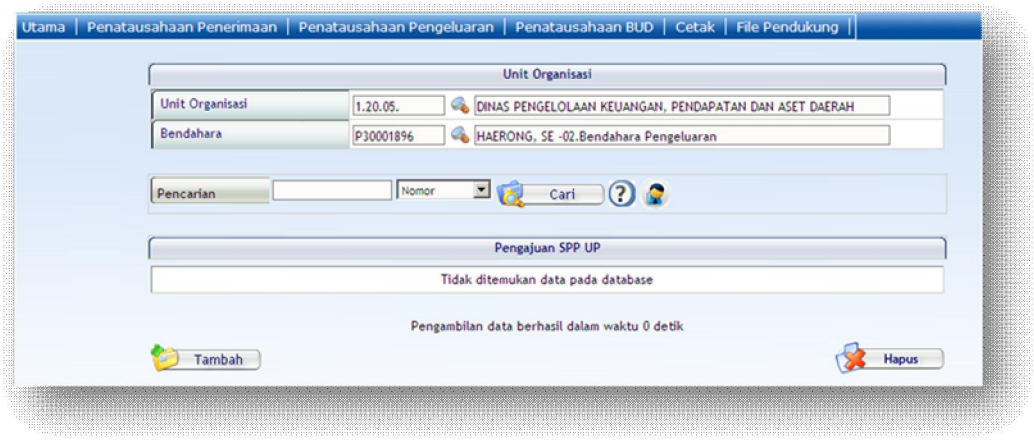
4.2.2 Tampilan Menu Utama SPP (Surat Permohonan Pengajuan) Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)



Gambar 4.4

Menu pengajuan SPP Uang Persediaan SKPD

Selanjutnya akan tampil form isian sebagai berikut :

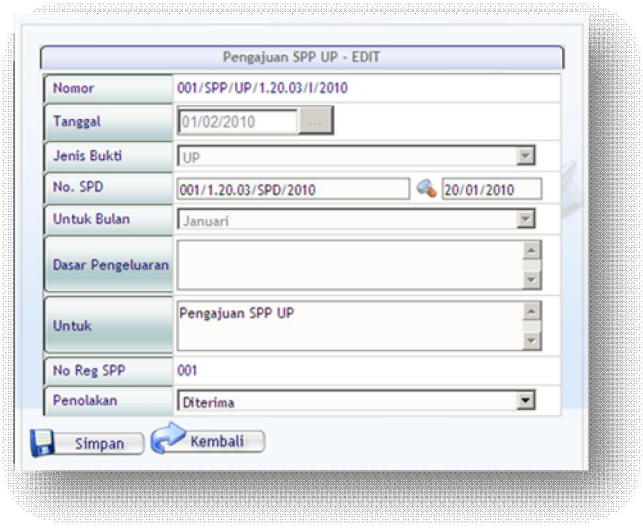


Gambar 4.5

Tampilan form SPP Uang Persediaan SKPD

Untuk menambah SPP klik tombol 

sehingga akan tampil Form isi/edit SPP uang persediaan SKPD sebagai berikut:



Gambar 4.6

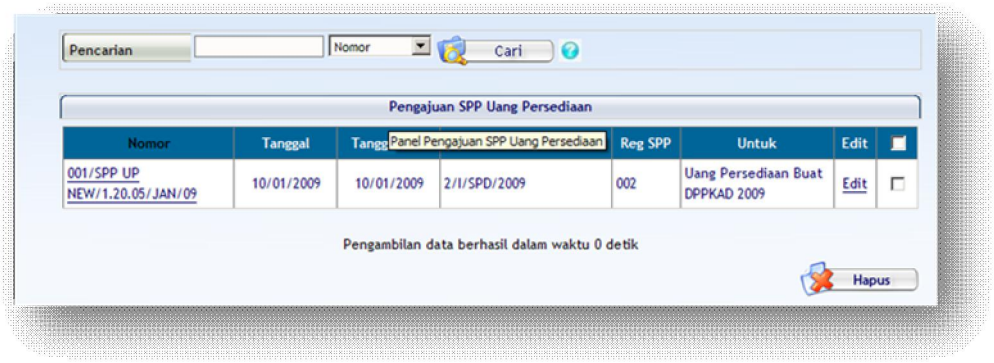
Tampilan isi/edit form SPP Uang Persediaan SKPD

Prosedur pengisian form SPP sebagai berikut:

1. Nomor diisi dengan sistem penomoran SPP yang berlaku di daerah atau dapat juga dilakukan secara autonumbered dengan mengatur struktur penomoran dalam menu utama, option.
2. Tanggal diisi dengan mengklik tombol klender yang terletak pada field tanggal, kemudian akan tampil kotak kalender sistem dan pilih tanggal yang ada dalam kotak kalender tersebut atau dapat dilakukan dengan melakukan pengetikan langsung didalam field.
3. Jenis bukti telah terisi secara otomatis.
4. No SPD diisi dengan mengklik tombol lookup yang kemudian akan tampil daftar lookup no SPD, pilih no SPD yang terdapat dalam formulir lookup tersebut.
5. Untuk Bulan diisi dengan memilih data bulan yang ada dalam combo
6. Dasar Pengesahan akan terisi secara otomatis bersamaan pada saat pengisian No SPD
7. Untuk diisi dengan penjelasan/keterangan yang diperlukan sebagai deskripsi penggunaan SPP
8. No Reg SPP telah terisi secara otomatis secara prenumbered dari sistem
9. Bendahara telah terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan bendahara pengeluaran SKPD

10. Penolakan dan Penandatanganan diisi dengan memilih data dalam combo

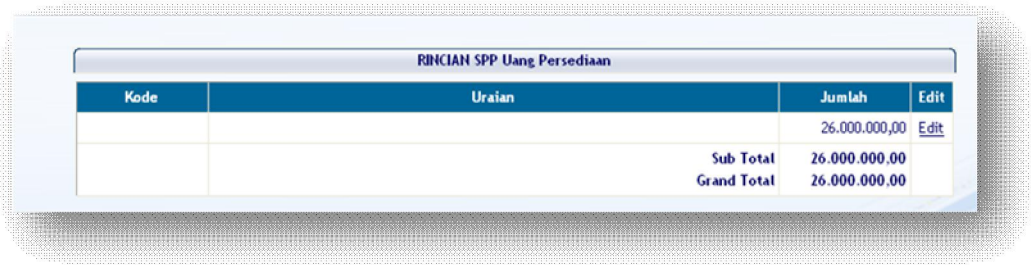
11. Klik tombol simpan untuk menyimpan data.



Gambar 4.7

Tampilan form SPP Uang Persediaan SKPD Isi

Untuk melihat rincian SPP klik pada no SPP yang akan dilihat rinciannya, kemudian akan tampil rincian rekening SPP dibawah form SPP sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :



Gambar 4.8

Rincian SPP Uang Persediaan SKPD

Pemasukan nilai UP dengan cara mengklik edit dan masukkan nilai yang diinginkan kemudian klik update untuk menyimpan data.

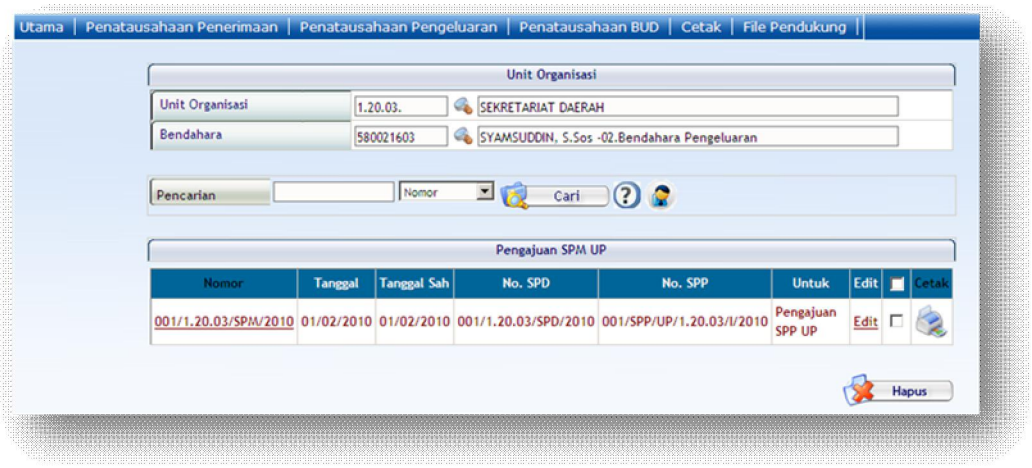
4.2.3 Tampilan Menu Utama SPM (Surat Perintah Membayar) Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)



Gambar 4.9

Menu SPM Uang Persediaan SKPD

Kemudian akan tampil form isian sebagaimana yang tampak dalam gambar berikut :

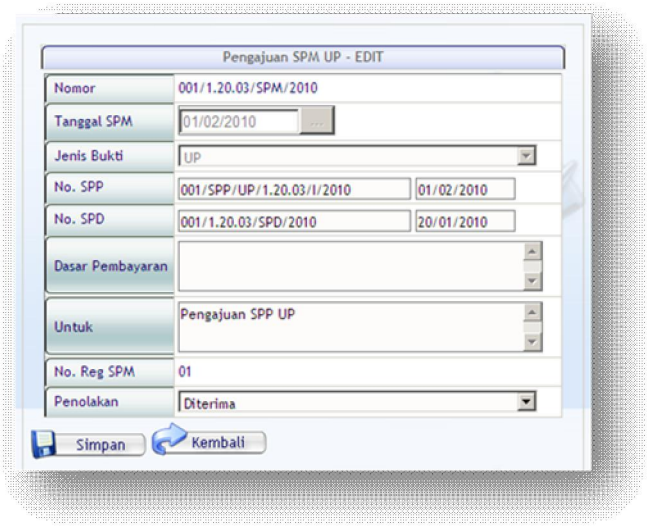


Gambar 4.10

Tampilan form SPM Uang Persediaan SKPD

Untuk menambah SPM dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol 

dan jika ingin mengedit SPM dilakukan dengan cara mengklik Edit yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit SPM uang persediaan SKPD sebagai berikut:



Gambar 4.11

Tampilan isi/edit form SPM Uang Persediaan SKPD

Prosedur pengisian form SPM sebagai berikut:

1. Nomor diisi dengan sistem penomoran SPM yang berlaku di daerah
2. Tanggal diisi dengan mengklik tombol klender yang terletak pada field tanggal, kemudian akan tampil kotak kalender sistem dan pilih tanggal yang ada dalam kotak kalender tersebut atau dapat dilakukan dengan pengetikan langsung didalam field
3. Jenis bukti telah terisi secara otomatis

4. No SPP diisi dengan mengklik tombol lookup yang kemudian akan tampil daftar lookup no SPP, pilih no SPP yang terdapat dalam formulir lookup tersebut

5. Tanggal SPP akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP

6. No SPD akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP

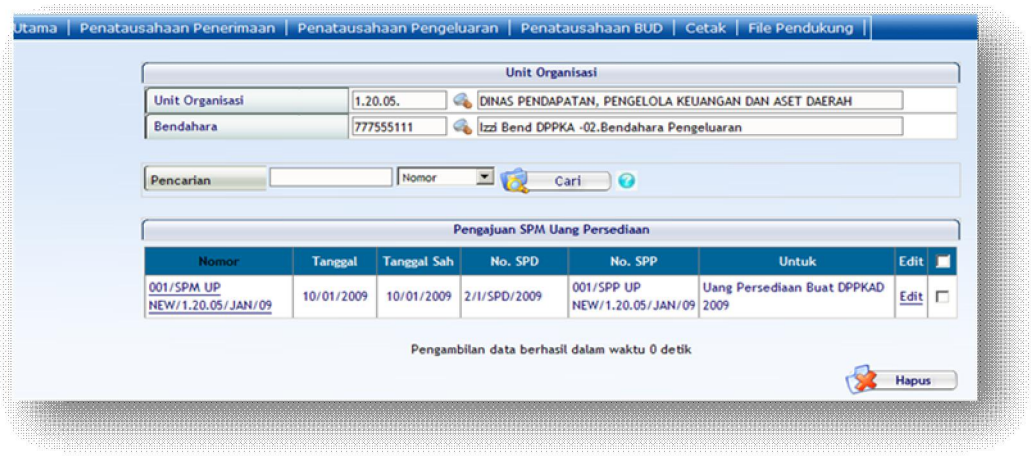
7. Dasar Pembayaran akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP

8. Untuk diisi dengan penjelasan/keterangan yang diperlukan sebagai deskripsi penggunaan SPM

9. No Reg SPP telah terisi secara otomatis secara prenumbered dari sistem

10. Penolakan dan Penandatanganan diisi dengan memilih data dalam combo

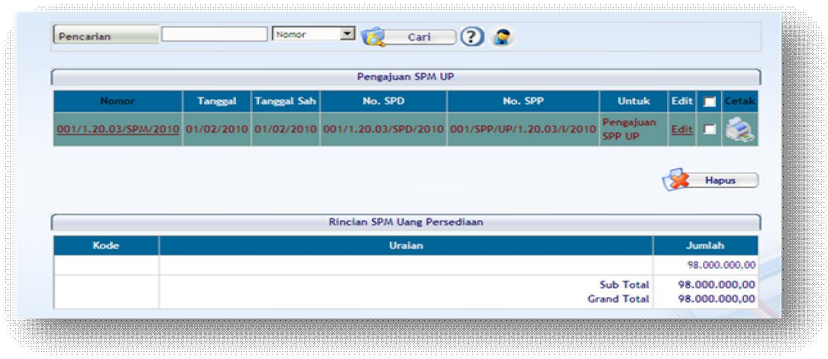
11. Klik tombol simpan untuk menyimpan data.



Gambar 4.12

form isi SPM Uang Persediaan SKPD

Untuk melihat rincian SPM dilakukan dengan cara mengklik pada no SPM yang akan dilihat rinciannya.



Gambar 4.13

Rincian SPM Uang Persediaan SKPD

Untuk melakukan pengisian nilai rekening, dilakukan dengan cara meng'klik' edit, kemudian masukkan nilai SPM lalu klik update untuk menyimpan data. Pembuatan SPM GU/TU dilakukan dengan cara yang sama.

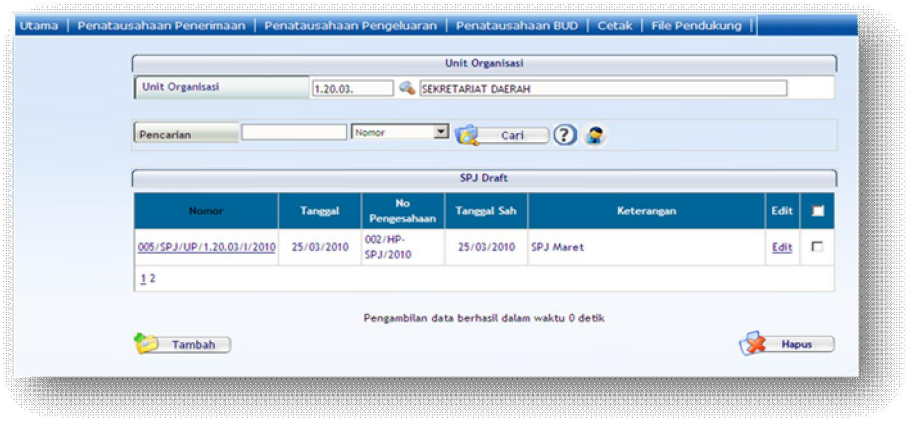
4.2.4 Tampilan Menu Utama SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)



Gambar 4.14

Menu Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung

kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :

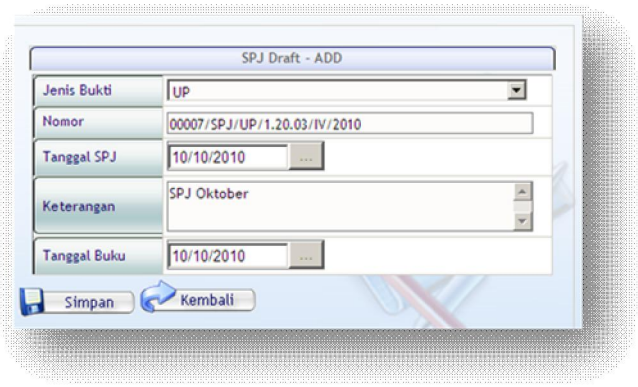


Gambar 4.15

Tampilan form Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung

Untuk menambah data Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah 

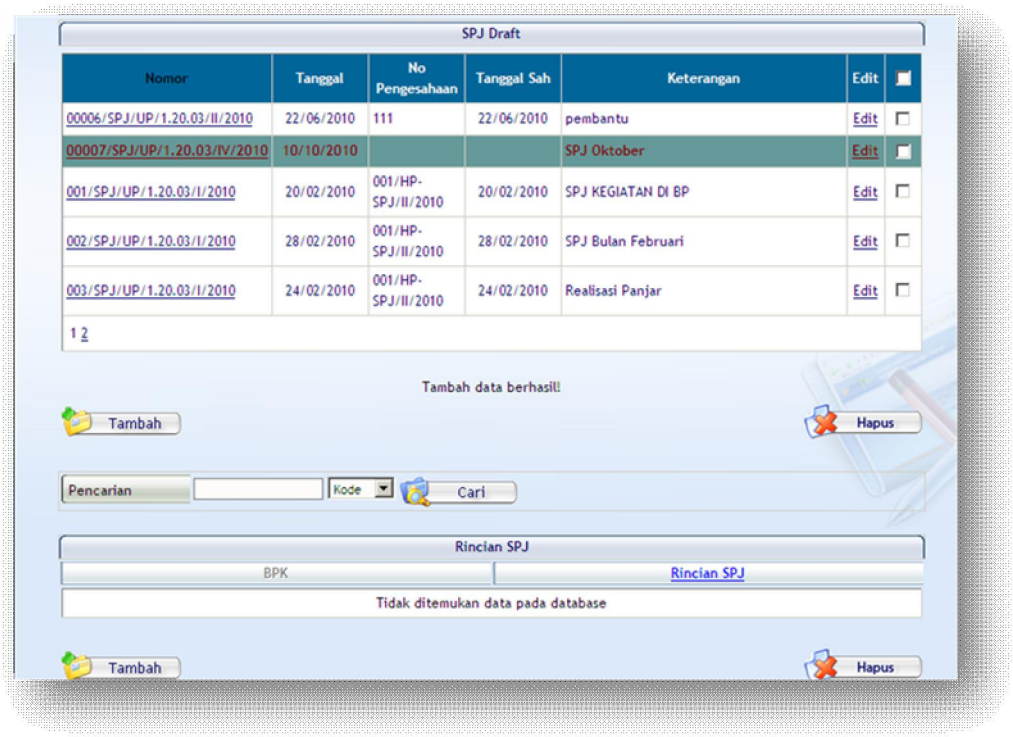
dan jika ingin mengedit Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung dilakukan dengan cara mengklik Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung sebagai berikut :



Gambar 4.16

Tampilan isi/edit form Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung

Jenis Bukti diisi dengan memilih data status atau jenis transaksi dari dalam kotak kombo yaitu transaksi UP dan transaksi TU. Tanggal Buku merupakan tanggal pencatatan sehingga diisi dengan tanggal pada saat SPJ dibukukan. Klik tombol simpan untuk menyimpan data.



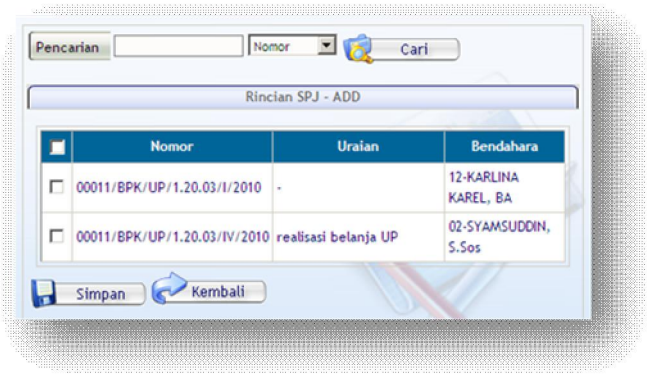
Gambar 4.17

Tampilan form Tambah Data

Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung

Dalam form dapat dilihat bahwa form terdiri dari tiga tab utama yaitu BPK dan Rincian SPJ. Tab BPK berfungsi untuk memasukkan data BPK. Untuk menambah BPK yang akan dipertanggungjawabkan dilakukan dengan cara mengklik tombol 

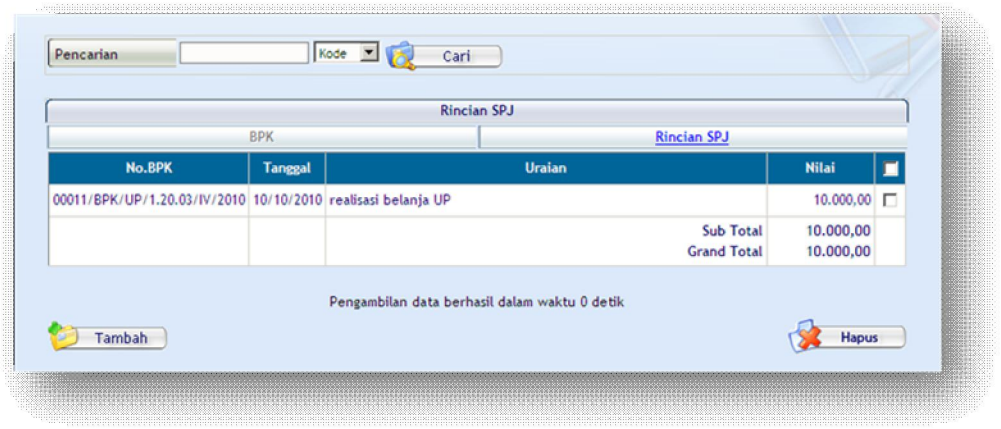
, selanjutnya akan tampil Form tambah Kode BPK untuk UP/GU/TU Belanja langsung sebagai berikut :



Gambar 4.18

Form Tambah BPK

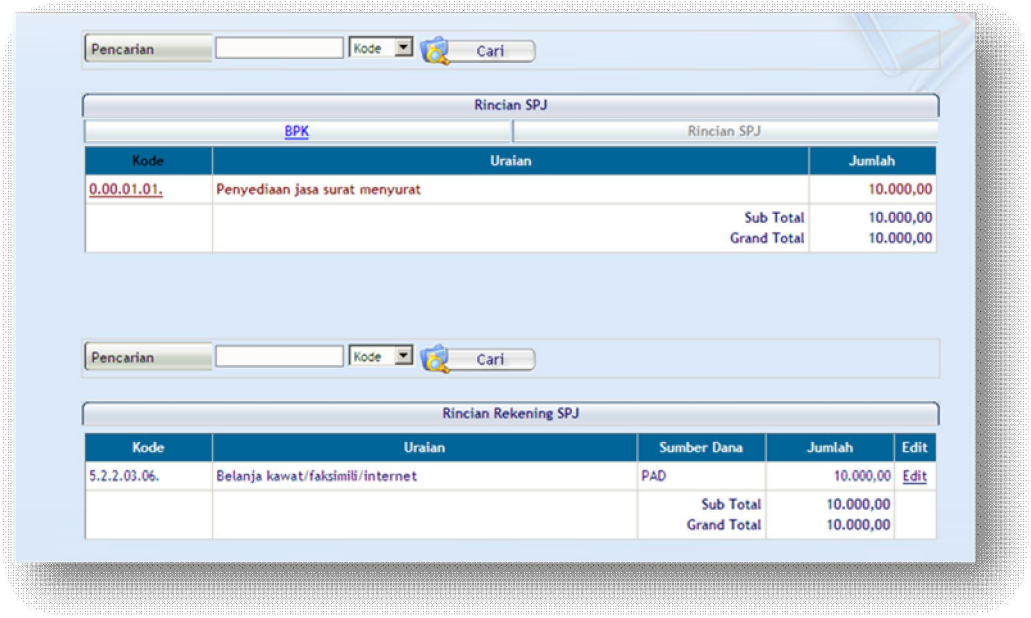
Berikan tanda ceklis dalam kotak kecil disamping kode, kemudian setelah terisi, klik tombol  untuk menyimpan data.



Gambar 4.19

Daftar BPK Pertanggungjawaban UP/GU/TU

Rincian SPJ telah terisi secara otomatis pada saat pemasukan data BPK kedalam SPJ. Rincian SPJ dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 4.20

Daftar rincian SPJ

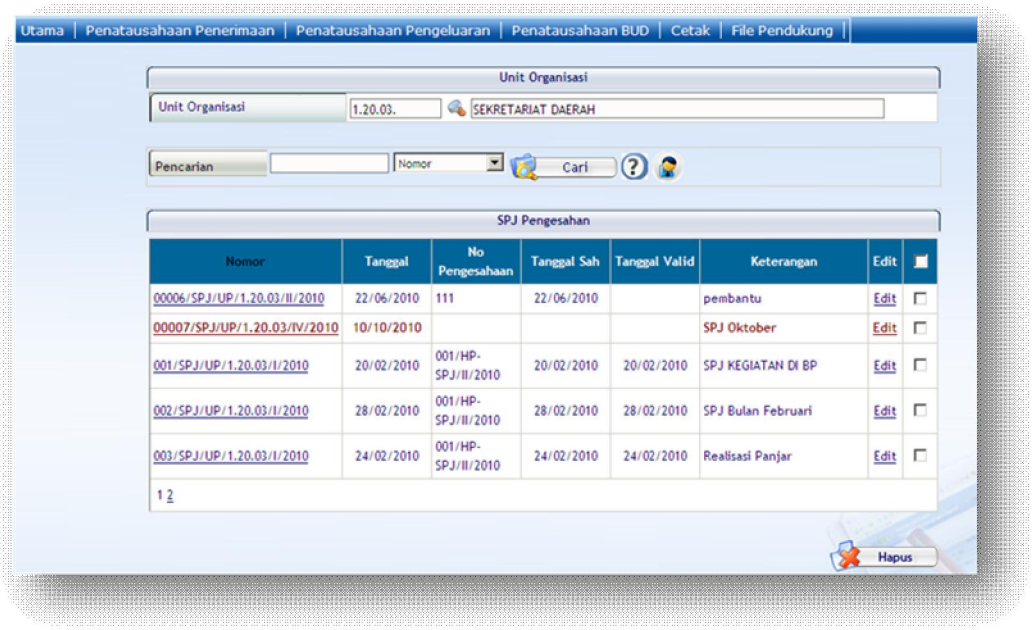
Pembuatan Pengesahan SPJ



Gambar 4.21

Menu Pertanggungjawaban UP/GU/TU Persetujuan

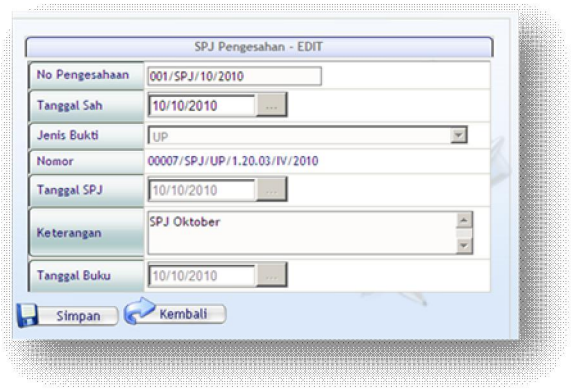
Proses persetujuan SPJ dilakukan dengan memberikan nomor dan tanggal pengesahan pada SPJ. Jika tanggal valid sudah terisi artinya SPJ telah disahkan. Jika SPJ sudah disahkan maka data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara-cara ini berlaku untuk semua SPJ. Setelah memilih menu tersebut kemudian akan tampil form sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :



Gambar 4.22

Form daftar SPJ Pengesahan

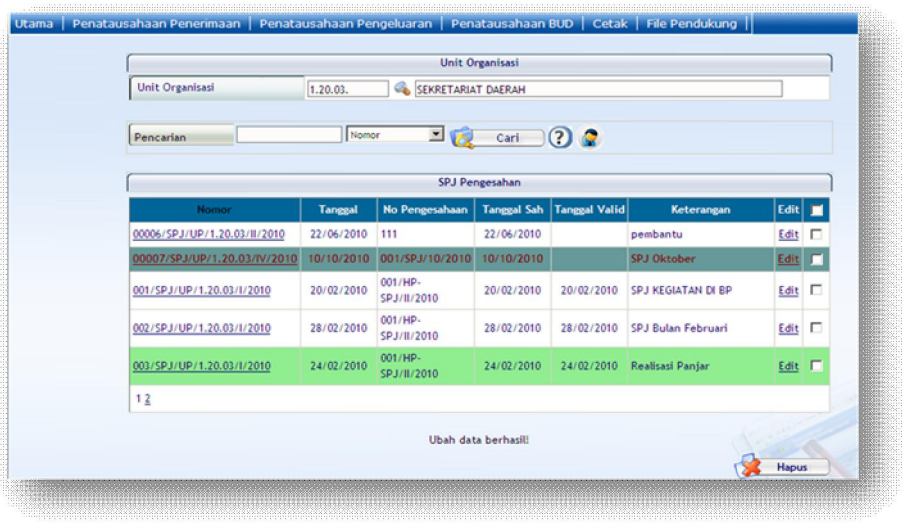
Untuk menampilkan form pengesahan SPJ belanja langsung klik tombol edit pada SPJ yang akan disahkan, selanjutnya akan tampil form pengesahan SPJ berikut :



Gambar 4.23

Form Persetujuan SPJ

Pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol kalender yang berada pada ujung kiri field ‘tanggal sah’, selanjutnya akan tampil kotak kalender sistem, pilih tanggal pada kotak kalender sistem tersebut atau dapat pula dilakukan pengetikan langsung pada field tanggal dan setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data.



Gambar 4.24

Form daftar SPJ Pengesahan isi

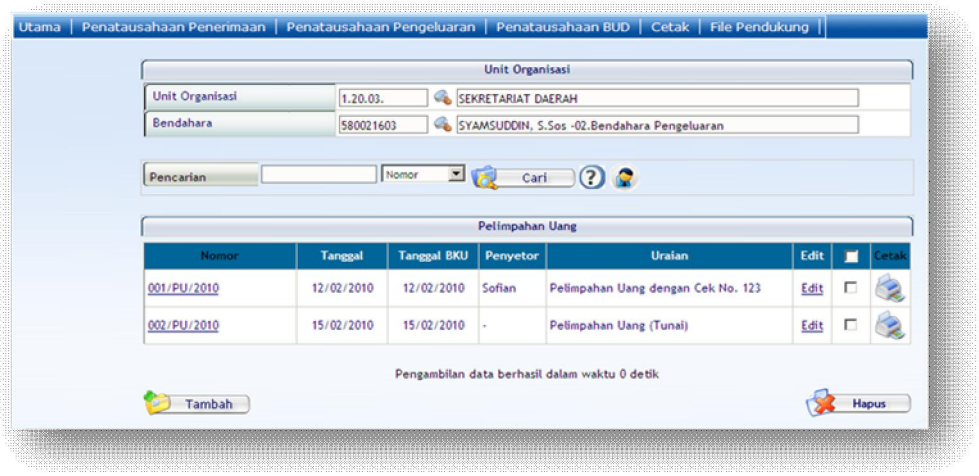
4.2.5 Tampilan Menu Utama Pelimpahan Uang (SP2D) Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)



Gambar 4.25

Menu Pelimpahan Uang BP ke BPP

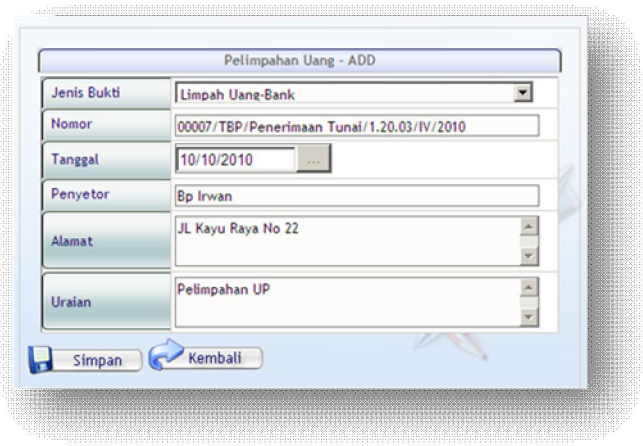
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pengelolaan pelimpahan uang sebagai berikut :



Gambar 4.26

Tampilan Form Pelimpahan Uang

Untuk menambah data transaksi pelimpahan uang, klik tombol tambah selanjutnya akan tampil form penambahan data sebagai berikut :

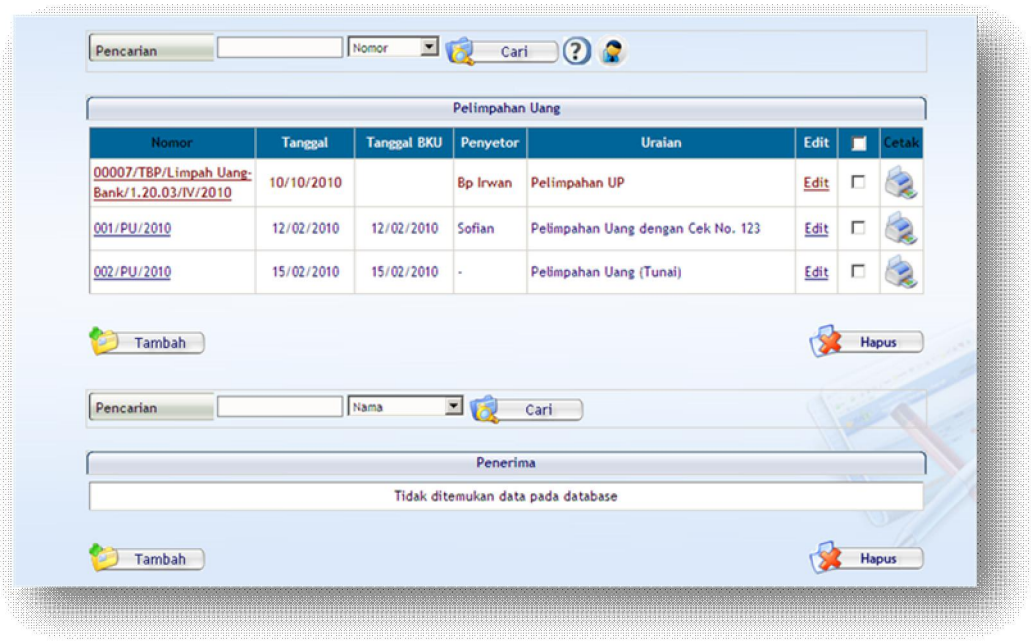


Gambar 4.27

Form Pengisian Pelimpahan Uang

Jenis Bukti terdiri dari beberapa jenis transaksi pelimpahan yaitu Limpah Uang-Bank apabila pelimpahan uang dimana proses pemberiannya melalui transfer bank, Limpah Uang-Tunai apabila proses pemberiannya dilakukan secara tunai dan Limpah Uang-Cek apabila proses pemberannya dilakukan dengan memberikan cek kepada BPP. Setelah pengisian selesai dilakukan, klik tombol 

untuk menyimpan data. Untuk memasukkan nama bendahara penerima, klik nomor bendahara pengirim sehingga akan tampil form penerima sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :

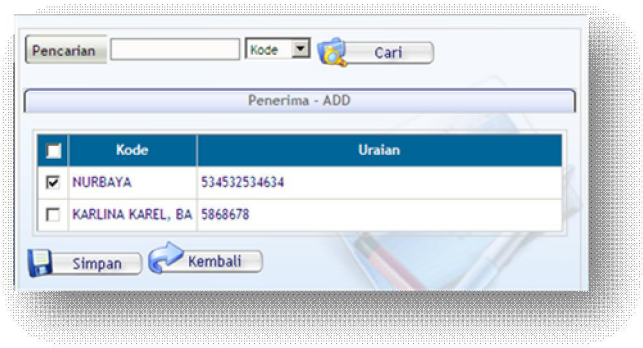


Gambar 4.28

Form Bendahara Penerima

Untuk menambah data, klik tombol 

, kemudian akan tampil daftar bendahara penerima sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :



Gambar 4.29

Form Tambah Bendahara Penerima

Setelah pemilihan data selesai dilakukan, selanjutnya klik tombol 

untuk menyimpan data, pengisian nilai rekening dilakukan dengan cara yang sama dengan proses pengisian rekening yang telah dijelaskan sebelumnya. Kolom Tanggal BKU akan terisi setelah proses pencatatan kedalam BKU telah dilakukan.

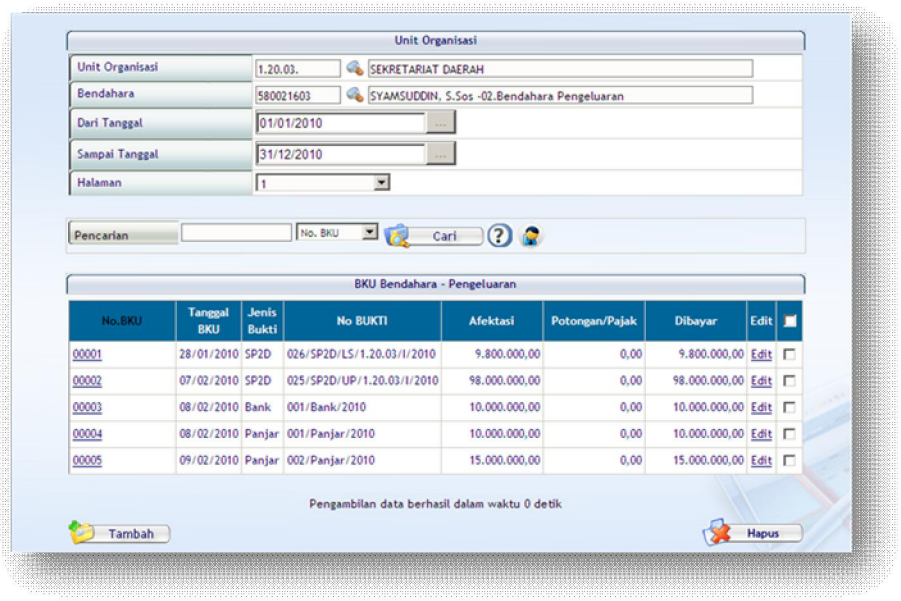
4.2.6 Tampilan Menu Utama BKU (Buku Kas Umum) Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)



Gambar 4.30

Menu Penatausahaan Pengeluaran Buku Kas Umum

kemudian akan tampil form sebagai berikut :

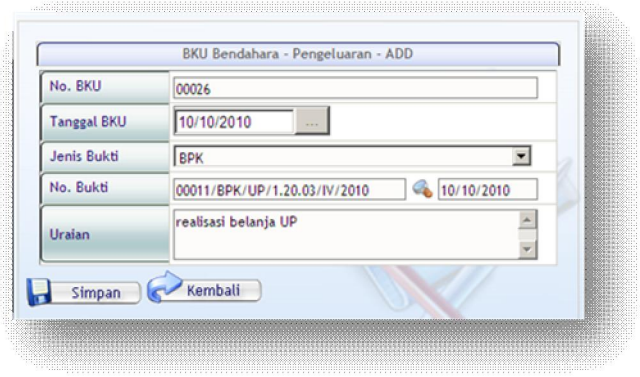


Gambar 4.31

Daftar Buku Kas Umum

Untuk menambah buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik tombol 

dan jika ingin mengedit buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit buku kas umum sebagai berikut:



Gambar 4.32

Tampilan isi/edit form Buku Kas Umum

Klik tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk melihat rincian buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no buku kas umum yang akan dilihat rinciannya.

4.2.7 Alur Prosedur Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Alur prosedur yang akan digunakan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tersebut dalam penelitian ini adalah Flowmap, Konteks Diagram dan DFD (*Data Flow Diagram*). Disini akan dijelaskan mengenai alur prosedur Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat yang sedang berjalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.9, 4.10 dan 4.11 berikut ini:

1. Pihak Administrasi memberikan data keuangan kepada BPP
2. Dari data keuangan dibuat anggaran Keuangan oleh BPP
3. BPP membuat SPP (Surat Permohonan Pengajuan) dari anggaran keuangan
4. Pihak Verifikator mengecek SPP pengajuan dan mengesahkannya, apabila anggaran disetujui langsung SPP disahkan tetapi apabila anggaran tidak di setujui, SPP dikembalikan kepada BPP
5. Kemudian SPP yang sudah disahkan diberikan kembali kepada BPP
6. SPP yang sudah disahkan oleh BPP dibuat laporan dan diarsipkan

7. Dari SPP yang telah disahkan, BPP membuat BKU (Buku Kas Umum), kemudian BKU tersebut dibuat laporannya dan diarsipkan.

8. BPP membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) berdasarkan data BKU

9. SPJ diberikan ke pihak verifikator untuk disahkan, kemudian SPJ yang sudah disahkan diberikan kembali kepada BPP

10. Oleh BPP dibuat juga laporan SPJ yang sudah disahkan dan dikirimkan juga kepada pihak BP

11. Selanjutnya SPP dan BKU yang sudah disahkan diberikan kepada pihak BP untuk dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan diberikan kepada pihak BPP

12. SPM dibuat laporannya untuk diarsipkan oleh pihak BP

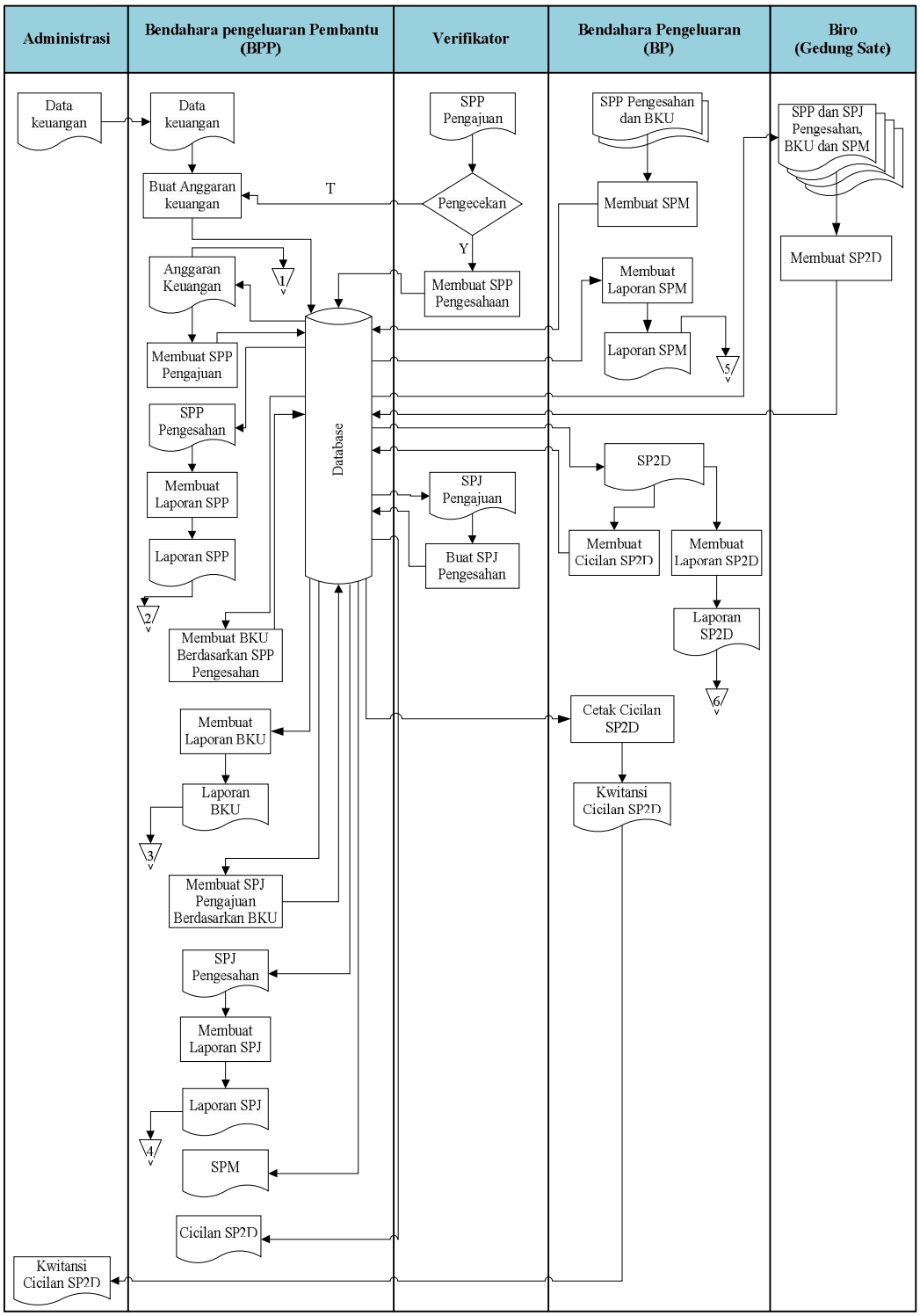
13. Kemudian pihak BP memberikan SPP valid, BKU, SPJ valid dan SPM kepada pihak Biro

14. Selanjutnya pihak biro membuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang kemudian dikirimkan kepada BP

15. Pihak BP membuatkan laporan SP2D untuk diarsipkan

16. Kemudian BP juga membuat SP2D cicilan yang dapat dicek oleh BPP untuk setiap pengambilan dana anggaran.

17. Pihak BP juga membuat kwitansi SP2D cicilan untuk diberikan kepada pihak administrasi.



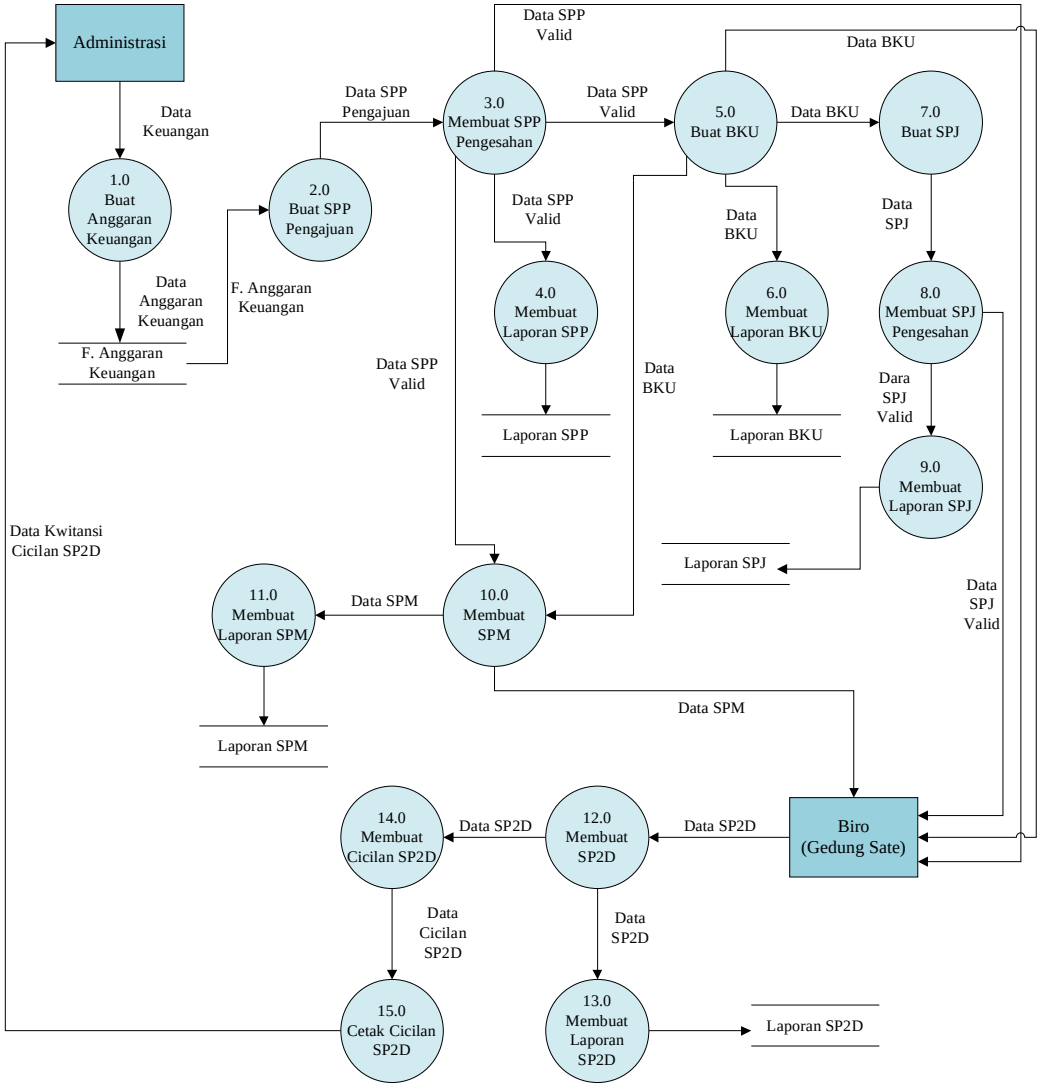
Gambar 4.33

Flowmap Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)



Gambar 4.34

Konteks Diagram Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)



Gambar 4.35

DFD Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

4.3 Analisis Deskriptif

Berikut adalah hasil analisis deskriptif pada penelitian yang berjudul Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Pendekatan *User Usability* Di Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat, dapat di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum Skor\ Aktual}{\sum Skor\ Ideal} \times 100\%$$

(Sumber : Umi Narimawati, 2007:85)

Keterangan :

1. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
2. Skor ideal adalah nilai tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi (5 X 60 = 300).

Sehingga hasil dari perhitungan rumus diatas dikonfirmasikan dengan kriteria yang telah ditetapkan, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4

Kriteria Persentase Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	**20.00% – 36.00%**	Tidak Baik
2	**36.01% – 52.00%**	Kurang Baik
3	**52.01% – 68.00%**	Cukup
4	**68.01% – 84.00%**	Baik
5	**84.01% – 100%**	Sangat Baik

(Sumber : Umi Narimawati, 2007:85)

Selanjutnya hasil tersebut diolah dan dihitung dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian hasil dari tanggapan responden terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebagai berikut:

4.3.1 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (Variabel Independen) Berdasarkan Tanggapan Responden Penelitian (User/Pengguna)

Untuk mengetahui tanggapan karyawan divisi keuangan Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat atas peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka dari hasil kuesioner yang telah disebarkan terdapat beberapa tanggapan mengenai peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Hardware

Kriteria Jawaban	No. Instrumen						Total
	1	2	3	4	5	6	
(5) Sangat Setuju	24	25	28	24	19	21	141
(4) Setuju	27	27	26	27	25	29	161
(3) Netral	7	5	4	5	11	7	39
(2) Tidak Setuju	2	3	2	2	4	2	15
(1) Sangat Tidak Setuju	0	0	0	2	1	1	4
Skor Aktual	253	254	260	249	237	247	**1500**
Skor Ideal	300	300	300	300	300	300	**1800**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{1500}{1800} \text{ X } 100\%$$

% skor aktual = **83,3%**

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah dilihat dari *hardwarenya* tergolong dalam kriteria baik, hal ini tercermin dari persentase skor tanggapan responden yaitu 83,3%, yang termasuk dalam kriteria baik dilihat dari tabel 4.5 berdasarkan persentase skor aktual.

Tabel 4.6

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Software

Kriteria Jawaban	No. Instrumen				Total
	1	2	3	4	
(5) Sangat Setuju	19	20	24	18	81
(4) Setuju	27	27	25	26	105
(3) Netral	12	9	8	13	42
(2) Tidak Setuju	2	3	1	3	9
(1) Sangat Tidak Setuju	0	1	2	0	3
Skor Aktual	243	242	248	239	**972**
Skor Ideal	300	300	300	300	**1200**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{972}{1200} \text{ X } 100\%$$

% skor aktual = **81%**

Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah dalam menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tergolong baik, hal ini terlihat dari persentase skor tanggapan responden 81% yang termasuk ke dalam kategori baik berdasarkan skor aktual. Hal ini dilihat dari segi *softwarenya* mengenai keamanan dalam penyimpanan data, kemudahan dalam pengoperasian pengolahan data, mendukung dalam aktivitas kerja dan prosedur kerjanya yang dapat dimengerti.

Tabel 4.7

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Brainware

Kriteria Jawaban	Indikator Brainware				Total
	1	2	3	4	
(5) Sangat Setuju	28	18	19	18	83
(4) Setuju	27	28	24	32	111
(3) Netral	5	13	15	6	39
(2) Tidak Setuju	0	1	2	4	7
(1) Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0
Skor Aktual	263	243	240	244	**990**
Skor Ideal	300	300	300	300	**1200**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{990}{1200} \text{ X } 100\%$$

% skor aktual = **83%**

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah dilihat dari indikator *brainwarenya*

digolongkan baik, hal ini tercermin dari persentase skor total tanggapan responden sebesar 83% yang termasuk dalam kriteria baik, dilihat dari tabel 4.7 berdasarkan persentase skor aktual.

Tabel 4.8

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Data

Kriteria Jawaban	Indikator Data				Total
	1	2	3	4	
(5) Sangat Setuju	20	18	19	20	77
(4) Setuju	28	26	30	30	114
(3) Netral	9	12	9	7	37
(2) Tidak Setuju	3	4	2	3	12
(1) Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0
Skor Aktual	245	238	246	247	**976**
Skor Ideal	300	300	300	300	**1200**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{976}{1200} \text{ X } 100\%$$

% skor aktual = **81,3%**

Pada segi datanya dalam pengolahan input, proses, output dan *distribution* yang dilakukan oleh Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah tergolong baik karena penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diterapkan secara optimal. Hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden 81,3% termasuk dalam kriteria baik, dilihat dari tabel 4.8 berdasarkan persentase skor aktual.

Tabel 4.9

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Prosedur

Kriteria Jawaban	Indikator Prosedur			Total
	1	2	3	
(5) Sangat Setuju	20	16	13	49
(4) Setuju	29	33	35	97
(3) Netral	7	8	10	25
(2) Tidak Setuju	4	3	2	9
(1) Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0
Skor Aktual	245	242	239	**726**
Skor Ideal	300	300	300	**900**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{726}{900} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 80{,}7\%$$

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah dilihat dari prosedurnya mengenai gambaran input, proses dan outputnya tergolong dalam kriteria baik, hal ini tercermin dari persentase skor tanggapan responden yaitu 80,7%, yang termasuk dalam kriteria baik dilihat dari tabel 4.9 berdasarkan persentase skor aktual.

Ringkasan Data Tanggapan Responden Variabel X (Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah diukur menggunakan lima indikator,

yaitu dari segi hardware, software, brainware, data dan prosedur. Responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

Tabel 4.10

Rekapitulasi Persentase Skor Total Tanggapan Responden Mengenai Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Persentase Total Skor Tanggapan Responden					
No.	**Indikator**	**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**% Skor Total**	**Kriteria**
1	Hardware	1500	1800	83,3%	Baik
2	Software	972	1200	81%	Baik
3	Brainware	990	1200	83%	Baik
4	Data	976	1200	81,3%	Baik
5	Prosedur	726	900	80,7%	Baik
Total		**5164**	**6300**	**82%**	**Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner (Tabel 4.4 - 4.8)

$$\text{Skor Total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\text{Skor Total} = \frac{5164}{6300} \text{ X } 100\%$$

Skor Total = 82%

Dari tabel diatas maka dapat diketahui untuk kriteria hardware, software, brainware, data dan prosedur memiliki skor total aktual sebesar 4921 sedangkan total skor ideal, yaitu sebesar 6000. Sehingga perhitungan dari total skor aktual dan total skor ideal dapat diketahui besarnya persentase skor total aktual, yaitu 82%.

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilakukan Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah termasuk dalam kriteria baik. Artinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah diterapkan oleh Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah sudah diterapkan dengan baik.

4.3.2 Implementasi *User Usability* (Variabel Dependen) Berdasarkan Tanggapan Responden Penelitian (User/Pengguna)

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang peneliti lakukan tentang implementasi *User Usability* (variabel Y), diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4.11

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Efektivitas

Kriteria Jawaban	Indikator Efektivitas				Total
	1	2	3	4	
(5) Sangat Setuju	20	16	20	15	71
(4) Setuju	29	21	24	33	107
(3) Netral	8	20	11	9	48
(2) Tidak Setuju	3	3	5	3	14
(1) Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0
Skor Aktual	246	230	239	240	**955**
Skor Ideal	300	300	300	300	**1200**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{955}{1200} \text{ X } 100\%$$

% skor aktual = **80%**

Efektivitas kerja pegawai yang ada pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah dalam hal ini sudah baik, hal ini terlihat dari persentase skor total tanggapan responden 80% yang termasuk dalam kriteria baik berdasarkan persentase skor aktual. Hal ini mengindentifikasikan bahwa setelah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), kemampuan para pegawai dalam menyelesaikan jumlah pekerjaannya sesuai dengan standar yang di tetapkan.

Tabel 4.12

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Efesiensi

Kriteria Jawaban	Indikator Efisien			Total
	1	2	3	
(5) Sangat Setuju	14	21	22	57
(4) Setuju	32	22	23	77
(3) Netral	9	14	12	35
(2) Tidak Setuju	5	3	2	10
(1) Sangat Tidak Setuju	0	0	1	1
Skor Aktual	235	241	243	**719**
Skor Ideal	300	300	300	**900**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{719}{900} \text{ X } 100\%$$

% skor aktual = **80%**

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap indikator efesiensi pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah terapkan oleh Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah sudah baik, hal ini tercermin dari jumlah persentase skor total tanggapan responden yaitu 80% yang termasuk dalam kriteria baik dilihat dari hasil persentase skor aktual. Hal ini mengindentifikasikan bahwa pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan lebih tepat dan sesuai dengan standar yang di tetapkan perusahaan.

Tabel 4.13

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator

Kepuasan Pengguna

Kriteria Jawaban	Indikator Kepuasan Pengguna												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(5) Sangat Setuju	12	9	10	16	14	11	12	13	22	26	15	17	177
(4) Setuju	31	29	26	18	25	29	31	31	24	21	33	24	322
(3) Netral	13	20	21	13	18	17	14	14	11	10	8	14	173
(2) Tidak Setuju	4	2	3	3	3	3	3	2	1	1	3	4	32
(1) Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	6
Skor Aktual	231	225	223	237	230	228	232	235	243	248	238	232	**2802**
Skor Ideal	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3600**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{2802}{3600} \text{ X } 100\%$$

% skor aktual = **78%**

Kepuasan pegawai terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang ada pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah dalam hal ini sudah baik, hal ini terlihat dari persentase skor total tanggapan responden 78% yang termasuk dalam kriteria baik berdasarkan persentase skor aktual. Hal ini mengindentifikasikan bahwa setelah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), para pegawai lebih mudah dalam menyelesaikan semua pekerjaannya sesuai dengan standar yang diterapkan perusahaan.

Ringkasan Data Tanggapan Responden Variabel Y (Pendeketan *User Usability*)

Penilaian *User Usability* terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang diterapkan pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah diukur menggunakan Tiga indikator, efektivitas, efisiensi dan kepuasan pengguna. Jawaban responden dikategorikan dalam 3 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai Pendekatan *User Usability* terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang diterapkan pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

Tabel 4.14

Rekapitulasi Persentase Skor Total Tanggapan Responden

Mengenai *User Usability*

Persentase Total Skor Tanggapan Responden					
No.	**Indikator**	**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**% Skor Aktual**	**Kriteria**
1	Efektivitas	955	1200	**80%**	Baik
2	Efisien	719	900	**80%**	Baik
3	Kepuasan Pengguna	2802	3600	**78%**	Baik
Total		**4476**	**5700**	**78,5%**	**Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner (Tabel 4.10 - 4.12)

$$\text{Skor Total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\text{Skor Total} = \frac{4476}{5700} \text{ X } 100\%$$

Skor Total = 78,5%

Dari tabel diatas maka dapat diketahui untuk kriteria efektivitas, efisiensi dan kepuasan pengguna memiliki skor total aktual sebesar 4476 sedangkan skor total ideal, yaitu sebesar 5700. Sehingga perhitungan dari skor total aktual dan skor total ideal dapat diketahui besarnya persentase skor total, yaitu 78,5%.

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa pendekatan *User Usability* terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah sudah termasuk baik. Artinya kriteria pendekatan *User Usability* terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah mempermudah pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dan telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

4.4 Analisis Verifikatif

Berikut adalah hasil analisis verifikatif pada penelitian yang berjudul Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Pendekatan User Usability Di Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

4.4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Bambang Soedibjo (2005:76) syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat atau dinyatakan valid adalah jika koefisien korelasi ≥ 0,30. Jadi apabila r positif, serta r hitung ≥ 0,30 (r kritis) maka item pernyataan tersebut valid sedangkan jika r tidak positif, serta r hitung ≤ 0,30 (r kritis) maka item pernyataan tersebut tidak valid.

Untuk mengetahui data item pernyataan kuesioner Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau Variabel Independen (X) valid atau tidaknya, dapat diolah terlebih dahulu dengan *Microsoft Excel 2007* dan diuji

menggunakan *SPSS 12.0 for windows*. Adapun hasil dari pengolahan data kuesioner tersebut mengenai validitas dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15

Item-Total Statistics (Uji Validitas Var. X)

Pernyataan	*r* Kritis	*r* Hitung	Keterangan
Item No. 1	0,30	**0,482**	Valid
Item No. 2	0,30	**0,560**	Valid
Item No. 3	0,30	**0,435**	Valid
Item No. 4	0,30	**0,430**	Valid
Item No. 5	0,30	**0,498**	Valid
Item No. 6	0,30	**0,613**	Valid
Item No. 7	0,30	**0,622**	Valid
Item No. 8	0,30	**0,553**	Valid
Item No. 9	0,30	**0,542**	Valid
Item No. 10	0,30	**0,612**	Valid
Item No. 11	0,30	**0,377**	Valid
Item No. 12	0,30	***0,281***	*Tidak Valid*
Item No. 13	0,30	**0,424**	Valid
Item No. 14	0,30	**0,608**	Valid
Item No. 15	0,30	**0,570**	Valid
Item No. 16	0,30	**0,677**	Valid
Item No. 17	0,30	**0,627**	Valid
Item No. 18	0,30	**0,581**	Valid
Item No. 19	0,30	**0,568**	Valid
Item No. 20	0,30	**0,508**	Valid
Item No. 21	0,30	**0,539**	Valid

Sumber: Pengolahan Data Menggunakan *SPSS 12.0 for Windows*

Dari data diatas disimpulkan bahwa instrumen pada variabel X (Peranan SIPKD) pada setiap variabel yang peneliti ajukan dalam kuesioner dapat mewakili objek yang diteliti, dimana dari 21 pernyataan variabel X (Peranan SIPKD) yang valid sebanyak 20 pernyataan, yaitu *r* Hitung ≥ *r* Kritis, sedangkan 1 pernyataan

yang tidak valid yang terdapat pada indikator *brainware* tidak dimasukkan ke dalam perhitungan selanjutnya karena masih ada pernyataan lainnya yang dapat mewakili pada indikator *brainware*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) akan mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Maka terdapat juga uji reliabilitas, adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Adapun pengujian reliabilitas pada item pernyataan kuesioner Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau variabel X. Menurut Sekaran dalam bukunya Bambang Soedibjo (2005:72), penilaian reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut:

a. Jika reliabilitas ≤ 0,60 menunjukkan bahwa instrumen dianggap kurang baik.
b. Jika reliabilitas disekitar 0,70 maka dikategorikan layak.
c. Jika reliabilitas ≥ 0,80 maka dikatakan baik.

Teknik perhitungan reliabilitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *SPSS 12.0 for Windows*, dalam tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.16

Reliability Statistics (Variabel X)

Cronbach's Alpha	N of Items
.904	21

Berdasarkan kriteria pengujian reliabilitas, maka instrumen peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki kehandalan yang signifikan, karena mempunyai α *Cronbach* 0,904 maka alat ukur atau kuesioner dikatakan baik dan dapat dipercaya atau dapat diandalkan (*reliable*).

Berikut ini merupakan data item pernyataan kuesioner *user usability* atau variabel dependen (Y) valid atau tidaknya dapat diolah terlebih dahulu dengan *Microsoft Excel 2007* dan diuji menggunakan *SPSS 12.0 for windows*. Adapun hasil dari pengolahan data kuesioner tersebut mengenai validitas dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17

Item-Total Statistics (Uji Validitas Var. Y)

Pernyataan	*r* Kritis	*r* Hitung	Keterangan
Item No. 1	0,30	**0,511**	Valid
Item No. 2	0,30	**0,474**	Valid
Item No. 3	0,30	**0,581**	Valid
Item No. 4	0,30	**0,485**	Valid
Item No. 5	0,30	**0,512**	Valid
Item No. 6	0,30	**0,524**	Valid
Item No. 7	0,30	**0,352**	Valid
Item No. 8	0,30	**0,497**	Valid
Item No. 9	0,30	**0,472**	Valid
Item No. 10	0,30	**0,555**	Valid
Item No. 11	0,30	**0,430**	Valid
Item No. 12	0,30	**0,464**	Valid
Item No. 13	0,30	**0,571**	Valid
Item No. 14	0,30	**0,514**	Valid
Item No. 15	0,30	**0,596**	Valid
Item No. 16	0,30	**0,403**	Valid
Item No. 17	0,30	**0,445**	Valid
Item No. 18	0,30	**0,468**	Valid
Item No. 19	0,30	**0,532**	Valid

Sumber: Pengolahan Data Menggunakan *SPSS 12.0 for Windows*

Dari data diatas disimpulkan bahwa instrumen pada variabel Y (*user usability*) pada setiap variabel yang peneliti ajukan dalam kuesioner dapat mewakili objek yang diteliti, dimana dari 19 pernyataan variabel Y (*user usability*) valid, yaitu *r* Hitung ≥ *r* Kritis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas *user usability* akan mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Adapun pengujian reliabilitas pada item pernyataan kuesioner *user usability,* dalam tabel 4.18 sebagai berikut :

Tabel 4.18

Reliability Statistics (Variabel Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.880	19

Berdasarkan kriteria pengujian reliabilitas, maka instrumen *user usability* memiliki kehandalan yang signifikan, karena mempunyai α *Cronbach* 0,880 maka alat ukur atau kuesioner dikatakan baik dan dapat dipercaya atau dapat diandalkan (reliable).

4.4.2 Hasil Uji Korelasi Karl Pearson

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuatkah keeratan hubungan peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap pendekatan *user usability*. Dimana keeretan hubungan variabel X dan variabel Y dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.19

Hubungan Antara Variabel X dan Y

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 - 0.199	Hubungan sangat rendah
0.20 – 0.399	Hubungan rendah
0.40 – 0.599	Hubungan sedang
0.60 – 0.799	Hubungan kuat
0.80 – 1.000	Hubungan sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2011:184)

Selanjutnya dari data-data yang diperoleh selama penelitian akan diolah menggunakan *software SPSS 12.0 for Windows*, yaitu:

Tabel 4.20

Correlations Variabel X & Variabel Y

		Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Pendekatan User Usability
Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Pearson Correlation	1	**.786****
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	60	60
Pendekatan User Usability	Pearson Correlation	**.786****	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Seperti angka pada output antara peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap pendekatan *user usability* menghasilkan nilai sebesar 0.786, nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut sudah kuat hubungannya, berdasarkan kriteria keeretan hubungan variabel X dan variabel Y pada tabel 4.19, korelasi 0.60 – 0.799 menunjukkan nilai korelasi yang kuat. Itu berarti variabel independen sudah kuat, selain itu variabel dependennya juga kuat dalam keterkaitan kedua variabel tersebut.

Sedangkan dengan melakukan perhitungan manual menurut Sugiyono (2011:183) didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

$$r = \frac{60(231040{,}9) - (3794{,}9462)(3573{,}16)}{\sqrt{\{60(247115{,}84) - (3794{,}9462)^2\}\{60(218594{,}93) - (3573{,}16)^2\}}}$$

$$r = \frac{13862454 - 13559950}{\sqrt{\{14826950 - 14401616\}\{13115696 - 12767472\}}}$$

$$r = \frac{302504{,}32}{\sqrt{\{425333{,}85\}\{348223{,}54\}}}$$

$$r = \frac{302504{,}32}{\sqrt{1481112612\ 73{,}774}}$$

$$r = \frac{302504{,}32}{384852\ \ ,2589}$$

$$r = 0{,}786$$

4.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi yang menyatakan besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen melalui hubungan X dan Y. Hasil perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan menggunakan *software SPSS 12 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.21

Model Summary[b] (Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786[a]	**.618**	.611	6.18391

a. Predictors: (Constant, Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
b. Dependent Variable: Pendekatan User Usability

Melalui data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,786 jadi kedekatan hubungan antara variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap pendekatan *user usability* yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,786. Artinya terdapat hubungan yang erat antara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap pendekatan *user usability*.

Selain koefisien korelasi (R), pada tabel diatas juga dapat ditemukan nilai R-square sebesar 0,618 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (Kd). Adapun perhitungan koefisien determinasi (Kd) sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$= (0{,}786)^2 * 100\%$$

$$= 0{,}618* 100\%$$

$$= \mathbf{61{,}8\%}$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh koefisien determinasi (Kd) sebesar 61,8%. Nilai tersebut berarti bahwa besarnya peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap pendekatan *user usability* sebesar 61,8%. Sedangkan sisanya 38,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

a. *Learnability* adalah tingkat kemudahan sistem untuk dipelajari, diukur melalui waktu yang diperlukan untuk mempelajari penggunaan sistem hingga mencapai level kemahiran tertentu.

b. *Memorability* merupakan proses recalling (mengingat) cara pemakaian sistem setelah pengguna tidak berinteraksi dengan sistem tersebut selama beberapa waktu.

c. Error (Kesalahan) merupakan frekuensi kesalahan yang tinggi pada saat penggunaan sistem mengindikasikan rendahnya *usability* sistem yang bersangkutan.

4.4.4 Hasil Uji Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu regresi linier sederhana. Regresi linier mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan satu variabel bebas (variabel independen) untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel terikat (variabel dependen). Secara umum persamaan umum regresi linear sederhana dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

Koefisien-koefisien regresi a dan b untuk regresi linier dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum X^2)(\sum Y) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \qquad b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Dimana : Y : *User Usability*

X : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

a : Konstanta

b : Koefisien variabel X

n : Banyaknya sampel

$$a = \frac{(\sum X^2)(\sum Y) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{(247115,84)(3573,16) - (3794,9462)(231040,9)}{60(247115,84)(3794,9462)^2}$$

$$a = \frac{882984416,7 - 876787778,5}{14826950 - 14401616}$$

$$a = \frac{6196638,286}{425333,8507}$$

$$a = 14,569$$

Sedangkan untuk b, yaitu koefisien variable X sebagai berikut:

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{60(231040,9) - (3794,9462)(3573,16)}{60(247115,84) - (3794,9462)^2}$$

$$b = \frac{13862454 - 13559950}{14826950 - 14401616}$$

$$b = \frac{302504,3171}{425333,8507}$$

$$b = 0,711$$

Dari data-data yang diperoleh selama penelitian akan diolah menggunakan *software SPSS 12.0 for Windows*. Maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.22

Coeefficient (a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	**14.569**	4.714		3.091	.003
	Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	**.711**	.073	.786	9.683	.000

a. Dependent Variable: Pendekatan User Usability

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 14.569 + 0,711 X

Dimana : Y = *User Usability*

X = Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) akan *user usability* pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak baik peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) akan membuat *user usability* pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat semakin rendah.

Arti dari persamaan dalam bentuk penjelasan secara ekonomis, yaitu untuk mengetahui Koefisien regresi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebesar 0,711 mempunyai arti bahwa setiap kenaikan untuk Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tersebut, maka diprediksikan *user usability* akan meningkat sebesar 0,711. Sementara nilai konstanta sebesar 14.569 menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X bernilai nol.

4.4.5 Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan akan menolak atau menerima hipotesis. Peneliti mencoba menganalisis hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan pengujian dasar pengambilan keputusan, menurut Sugiyono (2011:159). Maka ketentuan yang ditetapkan adalah:

a. Jika probabilitas (nilai sig.) ≥ 0,01 ; maka H0 diterima H1 ditolak.

b. Jika probabilitas (nilai sig.) ≤ 0,01 ; maka H0 ditolak H1 diterima.

Setelah variabel-variabel penelitian dapat diketahui, maka perumusan H_0 dan H_1 dapat ditulis sebagai berikut:

H0 : ρ = 0 ; tidak terdapat Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Pendekatan *User Usability*.

H1 : ρ ≠ 0 ; terdapat Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Pendekatan User Usability.

Uji signifikan terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan pengujian distribusi dengan tingkat signifikan yang diambil adalah 1% dalam tingkat

kesalahan data dan 99% data dinyatakan tepat dalam penelitian ini, berdasarkan hasil dari output dibawah ini:

Tabel 4.23

Correlations (Sig. 2-Tailed)

		Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Pendekatan User Usability
Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Pearson Correlation	1	**.786****
	Sig. (2-tailed)	.	**.000**
	N	60	60
Pendekatan User Usability	Pearson Correlation	**.786****	1
	Sig. (2-tailed)	**.000**	.
	N	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Berdasarkan pengujian dasar pengambilan keputusan diatas, maka diperoleh probabilitas (nilai sig.) sebesar 0,000 dengan tingkat signifikan 1%. Dari output tabel 4.23 diatas menunjukkan jika probabilitas (nilai sig.) ≤ 0,01 ; maka H0 ditolak H1 diterima, maka nilai probabilitas (sig.) pada 0,000 berarti terdapat Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Pendekatan *User Usability* pada Dinas Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat.

4.5 Rancangan Yang Diusulkan

Berikut adalah rancangan yang diusulkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang akan dijelaskan melalui gambar alur prosedur Flowmap, Konteks Diagram dan DFD (*Data Flow Diagram*).

4.5.1 Prosedur Rancangan Yang Diusulkan

Adapun prosedur rancangan sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Administrasi memberikan data keuangan kepada BPP
2. Dari data keuangan dibuat anggaran Keuangan oleh BPP
3. BPP membuat SPP (Surat Permohonan Pengajuan) dari anggaran keuangan
4. Pihak BP mengecek SPP pengajuan dan mengesahkannya, apabila anggaran disetujui langsung SPP disahkan tetapi apabila anggaran tidak di setujui, SPP dikembalikan kepada BPP
5. Kemudian SPP yang sudah disahkan diberikan kembali kepada BPP
6. SPP yang sudah disahkan oleh BP dibuat laporan dan diarsipkan oleh BPP.
7. Dari SPP yang telah disahkan, BPP membuat BKU (Buku Kas Umum), kemudian BKU tersebut dibuat laporannya dan diarsipkan.
8. BPP membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) berdasarkan data BKU
9. SPJ diberikan ke pihak BP untuk disahkan, kemudian SPJ yang sudah disahkan diberikan kembali kepada BPP.

10. Oleh BPP dibuat juga laporan SPJ yang sudah disahkan untuk diarsipkan.

11. Selanjutnya SPP dan BKU yang sudah disahkan oleh pihak BP dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan diberikan kepada pihak BPP

12. SPM dibuat laporannya dan diarsipkan oleh pihak BP

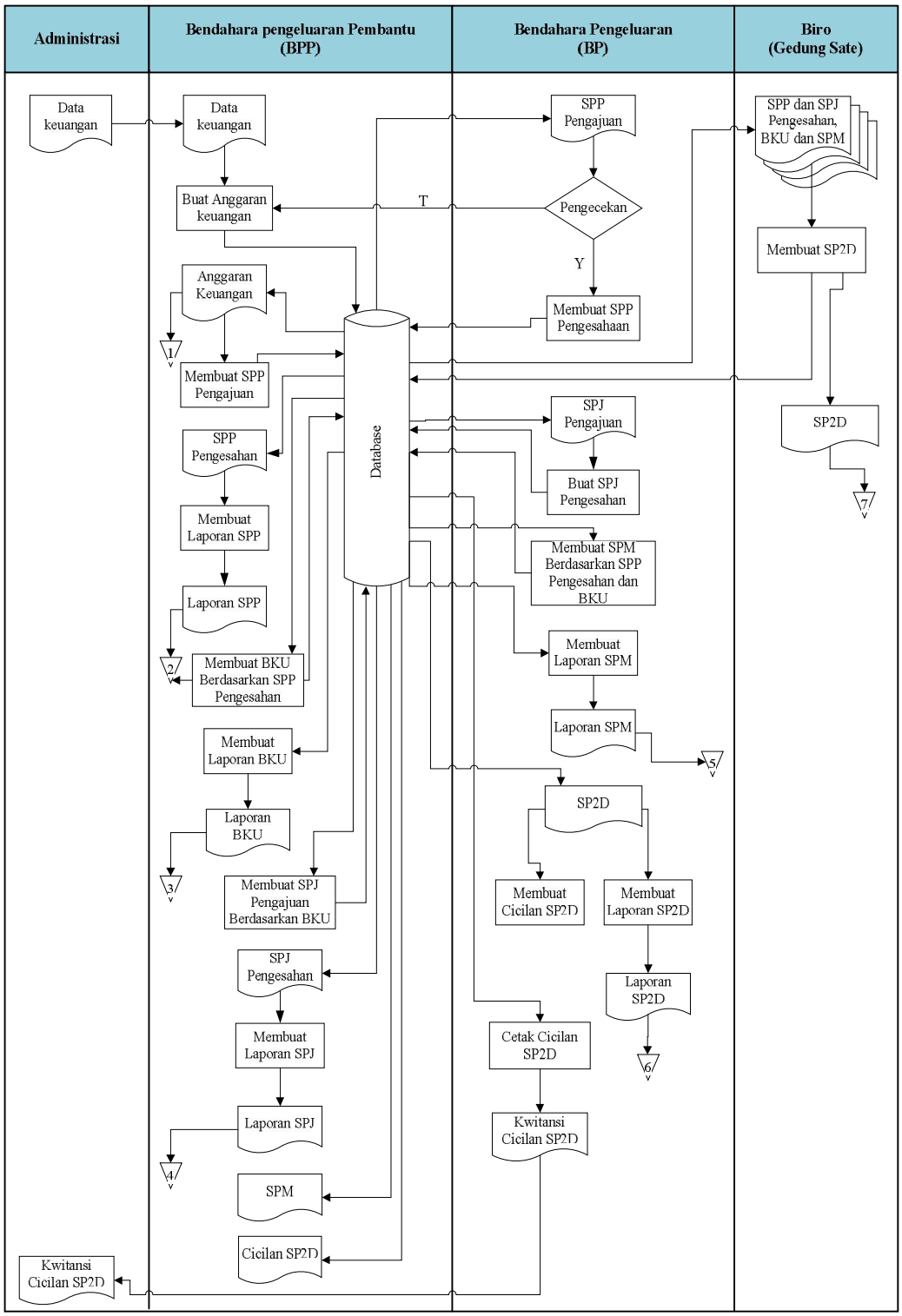
13. Kemudian pihak BP memberikan SPP valid, BKU, SPJ valid dan SPM kepada pihak Biro

14. Selanjutnya pihak biro membuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang kemudian dikirimkan kepada BP dan pihak biro mengarsipkan SP2Dnya.

15. Pihak BP membuatkan laporan SP2D untuk diarsipkan

16. Kemudian BP juga membuat SP2D cicilan yang dapat dicek oleh BPP untuk setiap pengambilan dana anggaran.

17. Pihak BP juga membuat kwitansi SP2D cicilan untuk diberikan kepada pihak administrasi.



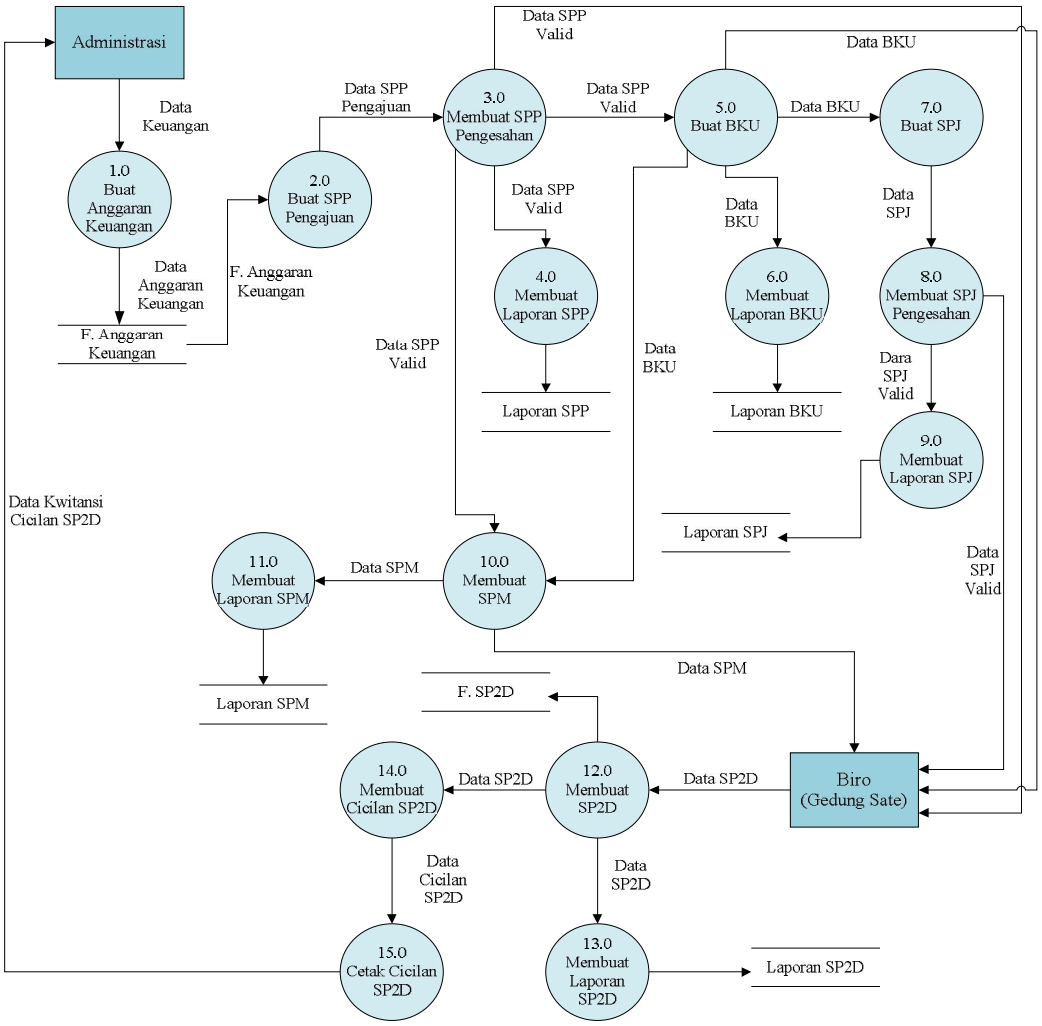
Gambar 4.36

Flowmap Rancangan Yang Diusulkan Pada SIPKD



Gambar 4.37

Konteks Diagram Yang Diusulkan Pada SIPKD



Gambar 4.38

DFD Yang Diusulkan Pada SIPKD